

PENGARUH CADANGAN WAJIB MINIMUM DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP INFLASI DI INDONESIA

Yesi Aprianti Sir

Universitas Diponegoro Semarang
(siryesiaprianti@yahoo.co.id)

Diterima : 10 November 2011, Disetujui: 13 Desember 2011

ABSTRACT

The study aimed to measure the impact of monetary policy issued by Bank of Indonesia (BI), that has the authority, on the inflation happening in Indonesia. Empirical variables included minimum mandatory reserves in minimum mandatory giro (X1) and interest rate of BI (X2) towards the inflation development (Y) in Indonesia. The research used quarterly data in 1993-2009. Monetary policy is intended to increase the amount of Statutory and BI rate and to lower the inflation. This means that the inflation and monetary policy had negative relationship. Simple Regression with double log was employed to analyze the data. The research confirmed that there was a positive effect between inflation and monetary policy. The statutory reserves and interest rates had a positive and significant impact on inflation in Indonesia in the short term. It means that the increase of compulsory reserves and BI rate will be accompanied by the increase of inflation.

Keywords: inflation, statutory reserves, interest rate, Ordinary Least Square (OLS)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh kebijakan bank sentral sebagai otoritas moneter (Bank Indonesia) atas penekanan inflasi di Indonesia. Variabel empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah cadangan wajib minimum yaitu giro wajib minimum (X_1) dan tingkat suku bunga yaitu BI rate (X_2) terhadap perkembangan inflasi (Y) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data semesteran pada periode 1993-2009. Kebijakan moneter dilakukan dengan menaikkan besaran Giro Wajib Minimum dan BI rate, dengan harapan akan menurunkan tingkat inflasi, artinya inflasi & kebijakan moneter memiliki hubungan negatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana secara double log. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif antara inflasi dan kebijakan moneter. GWM dan tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia dalam jangka pendek. Artinya kenaikan cadangan wajib dan BI rate akan diiringi dengan kenaikan inflasi.

Kata kunci: inflasi, GWM, BI rate, OLS

Salah satu permasalahan pokok yang dialami oleh perekonomian di Negara berkembang adalah upaya menjaga kestabilan makro ekonomi secara luas, khususnya dalam menjaga inflasi. Seperti penyakit, inflasi timbul karena berbagai sebab baik yang timbul dari sisi permintaan, maupun dari sisi penawaran. Inflasi sebagai salah satu masalah pokok dalam perekonomian, jika tidak dapat dikendalikan, apalagi sampai meningkat secara terus-menerus maka inflasi akan mendorong tindakan spekulasi yang akan mengancam kalkulasi biaya dan harga produk dan selanjutnya mengurangi investasi diikuti dengan berkurangnya kegiatan ekonomi, dan menambah pengangguran, sehingga memperlambat

pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1. Data Inflasi (IHK) Akhir Desember Tahun 1997-2009

Tahun	IHK	Tahun	IHK
1993	148,83	2001	249,15
1994	163,17	2002	274,13
1995	177,83	2003	287,99
1996	189,62	2004	116,86
1997	111,79	2005	136,86
1998	198,47	2006	145,89
1999	202,45	2007	102,52
2000	221,37	2008	113,86
		2009	117,03

Sumber: Bank Indonesia (Data diolah)

Bank Sentral memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan ataupun himbauan moral kepada masyarakat untuk menabungkan sejumlah dana atau kelebihan uang yang dimiliki. Pengukuran pengendalian inflasi yang dilakukan dalam penelitian ini dibatasi pada dua instrumen kebijakan, hal ini dikarenakan terdapat kesamaan yaitu kedua variabel ini ditunjukkan pada sisi perbankan.

Kebijakan cadangan wajib minimum mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancar yang besarnya adalah persentase tertentu dari kewajiban yang harus dibayarkan pada pihak dposit. Saat ini, kebijakan tersebut tertuang dalam ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang diterima bank, yang wajib dipelihara dalam rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Apabila Bank Indonesia memandang perlu untuk mengetatkan kebijakan moneter maka cadangan wajib tersebut dapat ditingkatkan, dan demikian pula sebaliknya.

Samuelson dan Nordaus (1992) mengemukakan "Selama masa inflasi sebaiknya kita menggunakan suku bunga riil bukan bunga dalam uang atau bunga nominal". Sehingga penting menggunakan suku bunga dengan telah memperhitungkan dan memasukkan pengaruh inflasi di dalamnya. *BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI Rate* juga dapat mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia, ketika terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia, maka Bank Indonesia akan meresponnya dengan menaikkan/menurunkan *BI Rate*.

Penerapan kebijakan giro wajib minimum dan *BI Rate* pada masa inflasi periode terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Penerapatan Kebijakan Giro Wajib Minimum dan *BI Rate*

Variabel	Sebelum	Tahun	Sesudah
1998 (masa pertama)			
IHK	111,79	198,47	202,45
GWM	12.616	21.717	25.666
BI Rate	11,13	38,44	12,51
2001 (masa kedua)			
IHK	221,37	249,15	274,13
GWM	28.475	31.336	34.331
BI Rate	14,53	17,62	12,93
2005 (masa ketiga)			
IHK	116,86	136,86	145,89
GWM	60.091	88.775	108.353
BI Rate	7,43	12,75	9,75

Sumber: Bank Indonesia (Data diolah)

Pada tabel 2 tersebut memperlihatkan penetapan *BI rate* dan jumlah GWM pada saat terjadi inflasi (tahun 1998, 2001, dan 2005). Pada masa pertama, dapat dinyatakan inflasi dan kebijakan moneter memiliki hubungan positif, dimana peningkatan IHK juga diikuti oleh peningkatan *BI rate* dan jumlah GWM, dan turun kembali pada tahun 1999. Pada masa kedua dan ketiga juga terjadi hubungan positif antara inflasi dan kebijakan moneter, namun penurunan inflasi tidak diikuti dengan penurunan penetapan *BI rate* dan jumlah GWM.

Teori Inflasi Klasik berpendapat bahwa tingkat harga terutama ditentukan oleh jumlah uang beredar, yang dapat dijelaskan melalui hubungan antara nilai uang dengan jumlah uang, serta nilai uang dan harga. Bila jumlah uang bertambah lebih cepat dari pertambahan barang maka nilai uang akan merosot dan ini sama dengan kenaikan harga. Jadi menurut teori klasik, inflasi berarti terlalu banyak uang beredar atau terlalu banyak kredit dibandingkan dengan volume transaksi, maka obatnya adalah membatasi jumlah uang beredar dan kredit sehingga diperlukan pengendalian secara moneter. Hal ini juga diteliti oleh penelitian sebelumnya:

- Hasniah (2006), dengan judul Kajian Tentang Masalah Inflasi di Indonesia periode 1996-2004, Variabel yang digunakan inflasi dan jumlah uang beredar. Penelitian ini menyimpulkan jumlah Uang beredar memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan inflasi, semakin banyak jumlah

uang beredar di masyarakat maka akan semakin tinggi tingkat inflasi (IHK).

- Andi Rachman Setyawan (2010), dalam jurnal berjudul *Efektifitas Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi di Indonesia*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan moneter melalui tingkat diskonto dan persyaratan cadangan wajib oleh Bank Sentral serta inflasi sebelumnya terhadap tingkat inflasi, dan untuk mengetahui efektivitas kebijakan moneter melalui tingkat diskonto dan GWM serta inflasi sebelumnya dalam mempengaruhi tingkat inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter (suku bunga dan cadangan wajib minimum) dari kuartal pertama 1985 sampai kuartal pertama 2010 masih kurang efektif pengaruh langsung terhadap inflasi, meskipun hubungan kebijakan moneter konsisten dengan teori moneter.
- Adwin S. Atmadja (1999), judul penelitian "Inflasi Di Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab dan Pengendaliannya". Penelitian tersebut menyimpulkan defisit APBN, peningkatan cadangan devisa, pembenahan sektor pertanian, pembenahan faktor-faktor dapat mempengaruhi posisi penawaran agregat perlu mendapatkan penanganan yang serius untuk dapat menekan inflasi ke tingkat yang serendah mungkin di Indonesia, disamping tentunya pengelolaan tepat dan pembenahan di sektor moneter.
- Ramaprasad Bhar dan Girijasankar Mallik (2012) dengan judul penelitian "*Components of Inflation Uncertainty and Interest Rates: Evidence from Australia and New Zealand*". Penelitian ini menemukan hubungan positif antara inflasi dan suku bunga nominal untuk Australia dan Selandia Baru. Peneliti kemudian menganalisa efek jangka panjang inflasi pada tingkat suku bunga, dan menunjukkan bahwa untuk satu persen peningkatan dari ekspektasi inflasi, Bank Sentral hanya perlu menaikkan tingkat suku bunga kurang dari satu persen atau dengan kata lain Bank Sentral tidak perlu terlalu kontraktif dalam hal suku bunga meningkat untuk menahan inflasi.
- Neny Erawati, Richard Llewelyn (2002) dalam penelitian berjudul "Analisa Pergerakan Suku

Bunga dan Laju Ekspektasi Inflasi Untuk Menentukan Kebijakan Moneter di Indonesia". Menyimpulkan Dalam mengatasi krisis yang terjadi pemerintah paling sering menggunakan SBI untuk menaikkan suku bunga Indonesia. Dalam pembentukan suku bunga perbankan, unsur ekspektasi inflasi masih diperhitungkan kecil. Sedangkan faktor lainnya masih lebih besar, seperti: kondisi likuiditas perbankan, pengeluaran perbankan yang kurang efisien, tersegmentasinya perbankan.

- Hossein Asgharpur, dkk (2005) dalam penelitian berjudul *The Relationships Between Interest Rates And Inflation Changes: An Analysis Of Long-Term Interest Rate Dynamics In Developing Countries*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bank-bank harus mengurangi suku bunga untuk mengurangi inflasi. Terdapat rasio hubungan kausal satu arah dari tingkat suku bunga untuk menilai inflasi.

Dengan diberlakukannya UU No.23 Tahun 1999 pasal 7 yaitu (1) Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian, maka sejak Tahun 2000 Bank Indonesia pada mulanya menetapkan sasaran inflasi pada awal Tahun yang akan dicapainya untuk Tahun yang bersangkutan. Sasaran ditetapkan untuk inflasi yang diukur dengan indeks harga konsumen (IHK) dengan mengeluarkan dampak dari kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan.

Berdasarkan latar belakang dan teori, maka pokok permasalahan yaitu: Bagaimana pengaruh cadangan wajib minimum bank dan tingkat suku bunga terhadap pengendalian inflasi di Indonesia pada tahun 1993-2009?

METODA PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian eksplanatif, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan antara 2 (dua) variabel atau lebih. Variabel penelitian mencakup Indeks Harga Konsumen, Giro Wajib

Minimum, dan BI Rate. dampak dari penetapan cadangan wajib bank dan suku bunga terhadap perkembangan inflasi yang terjadi di Indonesia Tahun 1993-2009.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Bank Indonesia (BI) tiap akhir semester dalam periode semester Januari-Juni dan Juli-Desember selama tahun penelitian yang berkenaan dengan perkembangan inflasi dalam indeks harga konsumsi (IHK), cadangan wajib minimum bank (GWM) dan suku bunga (BI Rate).

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda *double log* dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Untuk mendapatkan hasil estimasi yang baik, maka penaksiran dengan metode OLS akan melalui tahap uji asumsi klasik. Adapun persamaan regresi penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{Log } Y_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Log } X_{1t} + e \quad (1)$$

$$\text{Log } Y_t = \beta_0 + \beta_2 \text{Log } X_{2t+1} + e \quad (2)$$

Dimana:

Y : Inflasi dalam IHK

X₁ : Cadangan Wajib Minimum (Giro Wajib Minimum)

X₂ : Tingkat Suku Bunga (BI Rate)

β₀ : Intercept (Konstanta)

β₁, β₂ : Koefisien regresi.

e : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Inflasi Di Indonesia

Seperti halnya yang terjadi pada negara-negara berkembang pada umumnya, fenomena inflasi di Indonesia masih menjadi satu dari berbagai keburukan dalam perkembangan ekonomi makro yang meresahkan pemerintah terlebih bagi masyarakat. Secara bertahap, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara tidak langsung, atau yang sering disebut kebijakan moneter yang berorientasi pada pasar. Kebijakan moneter oleh Bank Indonesia salah satunya dilakukan untuk pengendalian inflasi yang terjadi dari Tahun ke Tahun. Terdapat berbagai cara yang dilakukan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, antara lain dengan menggunakan pengendalian terhadap cadangan wajib minimum bank yang tertuang dalam kebijakan giro wajib minimum (GWM) dan pengendalian diskonto yang tertuang dalam penetapan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI Rate).

Adapun perkembangan inflasi di Indonesia dapat di gambarkan dengan diagram seperti pada Gambar 2.

Pada Gambar 2 menunjukkan perkembangan inflasi pada Tahun 1993-2009. Dari Gambar 2, nilai persentase inflasi pada Tahun 1993-1997 megalami kestabilan atau masih dapat dikendalikan dimana persentase kenaikannya masih di bawah 10%. Pada awal Tahun 1998 mulai terjadi kenaikan inflasi yang terus berkembang hingga akhir Tahun 1998 yang



Sumber: Bank Indonesia (Data diolah)

Gambar 2. Perkembangan IHK 1993-2009

menjadi puncak inflasi tertinggi. Inflasi pada Tahun 1998 ini terjadi akibat adanya tingkat inflasi yang cukup tinggi yang dialami oleh salah satu negara Asia Tenggara yaitu Thailand. Banyak Negara yang mengalami inflasi tersebut, terutama pada negara-negara Asia Tenggara.

Inflasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). Persentase IHK menunjukkan kenaikan ataupun penurunan harga-harga secara menyeluruh di Indonesia yang diukur dengan pembobotan atas barang-barang pokok di tiap daerah. Sedangkan nilai persentase inflasi diukur dari selisih IHK tersebut.

GWM dan Inflasi

Pengujian asumsi klasik pada hasil penaksiran menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa model terkena autokorelasi karena nilai DW 1.224 lebih kecil dari dari batas dua 1,580 dan lebih besar dari $2 - 1,514 = 0,486$ serta $2 - 1,393 = 0,607$ atau $0 < 0,486 < 1,393$. Model terkena autokorelasi diperlukan penyembuhan autokorelasi yang dilakukan dengan Durbin's two step Method sehinggalah model tidak terjadi autokorelasi. Untuk uji heteroskedastisitas, model regresi terbebas dari penyakit heteroskedastisitas.

Tabel 3. Pengolahan OLS GWM dan INFLASI

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1.273	.078			16.247	.000
Ut_1	.798	.073	.953		10.951	.000

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

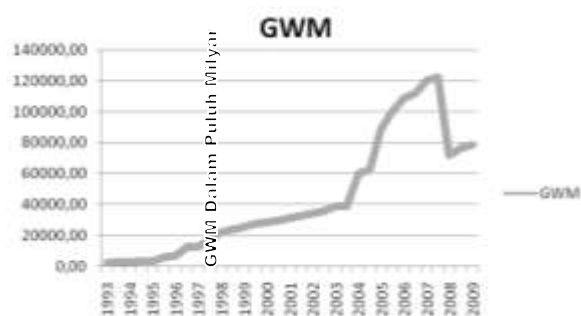
Hasil pengolahan Tabel 3 menunjukkan secara parsial variabel Cadangan Wajib Minimum (X_1) berpengaruh positif terhadap inflasi secara signifikan. Dengan persamaan:

$$\ln Y = 1,273 + 0,798GWM$$

Berdasarkan teori, Cadangan Wajib Minimum mempunyai pengaruh negatif terhadap inflasi. Hal ini menggambarkan bahwa dengan penentuan penetapan besaran Cadangan Wajib Minimum yang tepat maka akan berdampak terhadap pengendalian atau

penurunan nilai inflasi di Indonesia. Hasil ini berbeda dengan teori yang ada. Perkiraan yang dapat disimpulkan hal ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai uang (daya beli) pada tiap tahun penelitian, sehingga nilai GWM menjadi tidak konstan. Namun perlu penelitian yang lebih lanjut untuk membuktikan hal ini.

Penetapan cadangan wajib minimum merupakan salah satu dari kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi yang tertuang dalam UU Perbankan No.23 Tahun 1999. Perubahan besaran cadangan wajib minimum bank di Bank Indonesia dapat digambarkan dengan diagram berikut:



Sumber: Bank Indonesia (Data diolah)

Gambar 3. Perkembangan Cadangan Wajib Minimum Bank

Gambar 3 menunjukkan adanya perkembangan besaran cadangan wajib minimum yang dinyatakan dengan besaran giro wajib minimum (GWM) pada bank umum. Pada Tahun 1993-1996 besaran GWM dapat dikatakan tidak mengalami perubahan yang berarti. Hal ini dikarenakan perekonomian ataupun inflasi pada Tahun 1993-1996 berada pada keadaan stabil. Pada Tahun 1997, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan kebijakan besar GWM menjadi 5% dari aktiva lancar perbankan yang harus segera dibayar, yaitu terjadi peningkatan GWM yang semula hanya sebesar 3%.

Penetapan cadangan wajib minimum bank selain untuk mengendalikan jumlah uang beredar pada kebijakan makro, juga dimaksudkan untuk menjaga keadaan perbankan agar tetap berada dalam keadaan sehat. Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan menaikkan cadangan wajib minimum Bank, sehingga mengurangi kemampuan Bank umum dalam menyalurkan dananya ke masyarakat, sehingga uang yang beredar akan dapat ditekan. Dengan adanya Cadangan Wajib Minimum

yang cukup akan memungkinkan pengendalian atau pengurangan terhadap jumlah uang beredar terutama pada masa inflasi. Cadangan wajib minimum suatu bank dapat berfungsi sebagai alat likuiditas yang menstabilkan posisi keuangan bank umum pada saat krisis, akan tetapi Cadangan Wajib Minimum yang berlebihan akan menunjukkan adanya dana yang tidak produktif dan hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pihak perbankan. Sebaliknya ketidakcukupan Cadangan Wajib Minimum merupakan indikator utama kegagalan suatu bank dalam menjaga kestabilannya.

Suku Bunga dan Inflasi

Pengujian asumsi klasik pada hasil penaksiran menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa model terkena autokorelasi. Untuk itu diperlukan penyembuhan autokorelasi yang dilakukan dengan Durbin's two step Method sehinggamodel tidak terjadi autokorelasi. Untuk uji heteroskedastisitas, model regresi terbebas dari penyakit heteroskedastisitas.

Tabel 4. Pengolahan OLS Suku Bunga dan Inflasi

Model	Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
1 (Constant)	.675	.035		19.072	.000
Ut_2	.238	.024	.912	9.967	.000

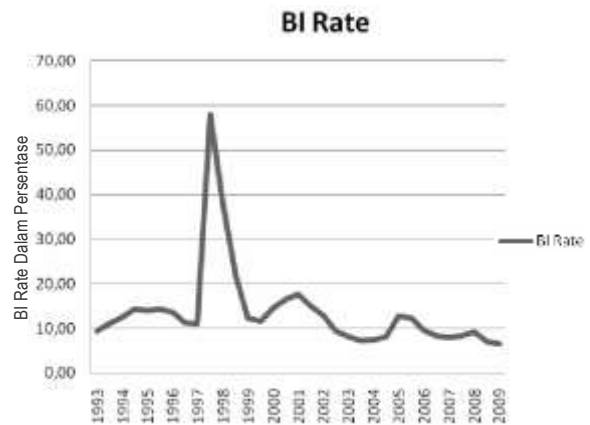
a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Hasil pengolahan Tabel 4 menunjukan adanya nilai signifikan antara Tingkat Suku Bunga (*BI rate*) dan Inflasi (IHK), dengan r^2 sebesar 0,832 atau 83,2%. Hasil tersebut dapat diringkas dengan persamaan:

$$\ln Y = 0,675 + 0,238\text{Birate}$$

Hal ini mengindikasikan bahwa adanya perubahan atau kenaikan terhadap penetapan besaran persentase *BI Rate* akan berdampak kearah perkembangan inflasi yang diharapkan. Hal ini tentu saja berbeda dengan dugaan sementara yang dilakukan di awal penelitian. Namun mengindikasikan pentingnya *BI rate* untuk mengarahkan nilai inflasi pada besaran yang diharapkan, hal ini sejalan dengan

penelitian terhadulu yaitu Peneliti Ramaprasad Bahar (2012) dan Hossein Asgharpur, dkk (2005). Tanpa adanya *BI rate* akan tercipta kelesuan pada perekonomian. Dengan adanya hubungan positif ini maka rentang tingkat suku bunga yang di tetapkan *BI* tidak dapat terlalu tinggi, pada saat ini *BI* menetapkan *BI rate* pada 6,5% dan bermaksud mempertahankan kisaran tersebut. Perkembangan dari perubahan suku bunga (*BI Rate*) dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Bank Indonesia (Data diolah)

Gambar 4. Perkembangan *BI Rate*

Pada Gambar 4 memperlihatkan perkembangan kebijakan Bank Indonesia atas perubahan penetapan *BI Rate* sebagai suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga yang sangat drastis ditunjukan pada akhir Tahun 1997 sampai akhir Tahun 1998 yaitu sebesar 58%, hal ini disebabkan terjadinya ketidakstabilan perekonomian akibat inflasi yang tinggi. Dari gambar juga dapat dilihat kenaikan tingkat suku bunga acuan dilakukan sebelum terjadi inflasi, artinya kebijakan penetapan suku bunga akan sangat mempertimbangkan ekspektasi inflasi.

Pada jalur suku bunga, secara teori perubahan *BI Rate* mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku bunga *BI Rate* diharapkan akan menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi

sehingga aktifitas perekonomian semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga *BI Rate* untuk mengerem aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi.

Perubahan suku bunga *BI Rate* juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Mekanisme ini sering disebut jalur nilai tukar. Kenaikan *BI Rate*, sebagai contoh, akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrument-instrumen keuangan di Indonesia seperti SBI karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi Rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor. Turunnya nett ekspor ini akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian.

Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh pada kecepatan transmisi kebijakan moneter itu sendiri (www.bi.go.id//Publikasi/Kebijakan+Moneter). Apabila perbankan melihat risiko pada perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga *BI Rate* biasanya sangat lambat. Juga, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang mengalami ketidak stabilan. Sehingga untuk pengendalian inflasi maka kondisi sektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor riil sangat berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter, dengan harapan pengambilan keputusan menggunakan perubahan besaran *BI Rate* akan berjalan lancar sesuai dengan target Bank Sentral.

Terdapat banyak fenomena dalam perekonomian yang dapat menyebabkan kegagalan pembuktian

dari teori yang ada. Hal ini disebabkan adanya ketidakpastian yang sering terjadi. Dalam penelitian ini, tidak didapatkan harapan dengan menaikkan suku bunga (*BI Rate*) akan menurunkan besaran inflasi atau *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap perkembangan inflasi. Kenyataan yang dihadapi jika BI menaikkan suku bunga acuan, tidak semua bank akan merespon hal ini karena bank akan menyesuaikan terlebih dahulu besaran Suku Bunga Bank dengan kegiatan operasional bank. Ataupun jika *BI Rate* diturunkan kembali maka kemungkinannya akan sangat lambat bagi perbankan untuk menurunkan suku bunganya, terutama suku bunga kredit.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan berbeda dengan teori sebelumnya, hubungan inflasi (IHK) dengan Tingkat suku bunga (*BI Rate*) menemukan hubungan positif antara inflasi dan tingkat suku bunga dalam jangka pendek, kenaikan tingkat suku bunga justru akan mengindikasikan terjadi kenaikan inflasi.

Saran. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bank Indonesia harus selalu memperhatikan kebutuhan Cadangan Wajib Minimum dan mempergunakan kebijakan Cadangan Wajib Minimum yang tepat untuk mencegah terjadi inflasi, karena jika terlalu banyak cadangan wajib minimum yang harus disimpan juga akan berarti mengurangi kesempatan di sektor finansial.
2. Bank Indonesia diharapkan lebih memperhatikan kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Hal ini dikarenakan kenaikan suku bunga akan menguntungkan pihak-pihak yang memiliki banyak simpanan di bank, tetapi sebaliknya akan membebani pihak yang membutuhkan dana. Adanya harapan kedepannya bagi Bank Umum untuk lebih memperhatikan ataupun merespon besaran suku bunga acuan (*BI Rate*) untuk memperlancar mekanisme kebijakan moneter.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwin S. Atmadja (1999), Inflasi di Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab dan Pengendaliannya, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 1, No. 1, Mei 1999, 54-67, Universitas Kristen Petra, Jakarta.
- Algifari. (1997). *Analisis Regresi: Teori, Kasus dan Solusi* (ed.1). Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Asgharpur, Hossein and Kohnehshahri, Lotfali Agheli and Karami, Azhdar (2007). "The relationships between interest rates and inflation changes: An analysis of long-term interest rate dynamics in developing countries". In: International Economic Conference on Trade and Industry (IECTI) 2007, 3 - 5 December 2007, Bayview Hotel Georgetown, Penang. (Unpublished) Diakses dari <http://repo.uum.edu.my/2416/> pada 1 Juni 2010
- Bank Indonesia.(2000). *Kamus Perbankan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia.(2001). *Laporan Tahunan Bank Indonesia*. Jakarta:Bank Indonesia.
- BankIndonesia. (2010). *Kebijakan Moneter*. Diakses dari www.bi.go.id/web/id/Publikasi/KebijakanMoneter/TinjauanKebijakanMoneter/TKM_0110.htm.
- Bhar,Ramaprasad., & Mallik, Girijasankar. (2012). Components of Inflation Uncertainty and Interest Rates: Evidence from Australia and New Zealand. *Economic Analysis & Policy*, 42(1).
- Erawati, Neny.,& Llewelyn, Richard.(2002).Analisa Pergerakan Suku Bunga dan Laju Ekspektasi Inflasi Untuk Menentukan Kebijakan Moneter di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol 4 No. 2, 98 – 10.
- Glocker, Christian., & Towbin, Pascal. (2012). The Macroeconomic Effects of Reserve Requirements. *WIFO Working Papers*, 4.
- Gujarati, Domodar N.,&Porter, Dawn C. (2012). *Dasar – Dasar Ekonometrika* (ed.5). Jakarta: Salemba Empat.
- Gul,Ekrem.,& Karami, Azhdar.(2006).The Causal Relationship Between Nominal Interest Rate and Inflation: The case of Turkey *Scientific Journal of Administrative Development*, 4.
- Hasniah. (2006). *Kajian Tentang Masalah Inflasi di Indonesia Periode 1996-2004*. Palu: Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako.
- Karl., & Fair. (2001). *Perbankan*. Surabaya.
- Kasmir. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Tarsito.
- Marbun, B. N. (2003). *Kamus Manajemen*. Jakarta: CV.Miliasari.
- Nelianti. (2004). *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Jumlah Kredit Usaha Kecil di Propinsi Sulawesi Tengah Periode 1992-2003*. Palu: Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako.
- Samuelson, Paul A., & William D. Nordhaus. (1992). *Ekonomi Jilid 1*. Jakarta:Erlangga.
- Setyawan, Andi Rachman. (2010). Efektifitas Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1).
- Surico, Paolo.(2007). The Fed's Monetary Policy Rule and US Inflation: The Case of Asymmetric Preferences. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 31, 305–324.
- Sunariyah. (2004). *Teori Ekonomi*. Jakarta: Djambatan.
- Triton, PB. (2006). *SPSS 13.0 Terapan: Riset Statistik Parametrik*. Yogyakarta: Andi.
- UU Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Jakarta
- Weston,. & Copeland. (1998). *Ekonomi Perbankan*. Bandung: Tarsito.
- Wijaya, Danang Sukarno. (2010). *Ekonomi Makro*. Diunduh diwww.scribd.com
- Winardi. (1987). *Pengantar Ekonomi Moneter*. Bandung: Tarsito.
- www.hubpages.com/hub/EXCEL-CALCULATOR-FOR-FLAT-INTEREST-RATE-Vs-DIMINISHING-INTEREST-RATE
- www.scribd.com/doc/25038213/TEORI-INFLASICANDERA, 24 Mei 2010
- www.zaimmukaffi.com/ekonomi-makro/113-bab-iv-indeks-harga-dan-inflasi.html